



**Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Balai Besar Pengembangan Penjaminan
Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan
Pariwisata
Tahun 2024**

No	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30%	27
2	Pengukuran Kinerja	30%	27
3	Pelaporan Kinerja	15%	12.75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20.5
Predikat		A	87.25

Catatan

A. Perencanaan Kinerja

1. Satker belum memiliki dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja sesuai dengan Renja T+1, DIPA, RKA, RAB, KAK/TOR.
2. Satker telah melakukan revisi Renstra 2020-2024 sebanyak 3 kali namun bukan dikarenakan perubahan OTK dan amanat perundangan

B. Pengukuran Kinerja

1. Pengumpulan data capaian kinerja berpedoman pada pedoman pengukuran kinerja, sedangkan Tata Cara pengumpulan data kinerja belum ada.
2. Satuan kerja telah melakukan penataan pegawai di internal organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, namun belum dilengkapi dengan Dokumen Analisis Beban Kerja ABK atau matriks peran hasil, Dokumen Peta Jabatan, Rencana Pengembangan Pegawai, Surat Keputusan Penataan Pegawai seperti rotasi dan promosi/demosi.
3. Terdapat dokumen analisis pengukuran kinerja, namun belum terlihat adanya refocusing yaitu: perubahan atas OTK atau struktur organisasi

C. Pelaporan Kinerja

1. Ada penyesuaian kinerja sebagai hasil laporan kinerja secara berkala, namun belum secara spesifik tergambar pada RKA yang digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja
2. Ada dokumen rapat pembahasan hasil/informasi laporan kinerja digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja namun belum secara spesifik tergambar pada RKA melalui perbandingan informasi



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

pada laporan kinerja dengan dokumen program dan kegiatan tahun berjalan.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Akuntabilitas Kinerja Internal , namun pendalaman nya belum memadai, seperti Evaluasi dilaksanakan secara sederhana dan terbatas yang dilengkapi dengan pembuktian dan pengujian lapangan, serta serta didukung dengan bukti-bukti yang memadai.
2. Satker telah memanfaatkan Hasil Evaluasi AKIP untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, namun perlu didukung dengan dokumen namun belum didukung dengan dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Monev Kinerja Triwulan 1, 2, 3 dan 4.
3. Satker telah memanfaatkan hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, namun belum didukung dengan dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Monev Kinerja Triwulan 1, 2, 3 dan 4
4. Satker telah memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja, namun belum didukung dengan dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Monev Kinerja Triwulan 1, 2, 3 dan 4

Rekomendasi

A. Perencanaan Kinerja

1. Satker agar dapat melengkapi dengan Renja T+1, DIPA, RKA, RAB, KAK/TOR dalam menyusun dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
2. Satker agar tidak terlalu banyak melakukan revisi jika tidak dikarenakan adanya perubahan OTK dan amanat perundangan dalam melakukan perencanaan yang lebih matang.

B. Pengukuran Kinerja

1. Satker agar melengkapi dokumen Tatacara Pengumpulan Data Kinerja dalam rangka pengukuran kinerja sehingga dapat lebih terarah.
2. Satker agar melengkapi data dukung berupa Dokumen Analisis Beban Kerja ABK atau matriks peran hasil, Dokumen Peta Jabatan, Rencana Pengembangan Pegawai, Surat Keputusan Penataan Pegawai seperti rotasi dan promosi/demosi dalam menyajikan informasi penataan pegawai di internal organisasi.
3. Satker agar menyajikan informasi refocusing atas perubahan OTK/organisasi dalam analisis pengukuran kinerja.

C. Pelaporan Kinerja

1. Satker agar secara spesifik mendeskripsikan pada RKA terkait penyesuaian kinerja dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja
2. Satker agar secara spesifik menggambarkan pada RKA terkait perbandingan informasi pada laporan kinerja dengan dokumen program dan kegiatan tahun berjalan

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Satker agar melengkapi dengan pembuktian dan pengujian lapangan, serta didukung dengan bukti-bukti yang memadai dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilakukan secara sederhana dan terbatas yang
2. Satker agar melengkapi data dukung berupa dokumen Laporan Monitoring Evaluasi (Monev) Kinerja



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Triwulan 1, 2, 3 dan 4 pada penyajian dan pemanfaatan Hasil Evaluasi AKIP untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, serta mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Jakarta, 10 Desember 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur IV

Subiyantoro



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik